



Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera Pada Masyarakat Non Muslim Di Kabupaten Karawang

Agus Muhidin¹, Wahyu Utami Dewi², Nurkinan³

¹Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3}Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 11 Juli 2022

Revised: 15 Juli 2022

Accepted: 18 Juli 2022

Abstract

This study aims to study and find out about the Political Communication of the Prosperous Justice Party in non-Muslim communities in Karawang Regency. The theory used is Political Communication and Nimmo with five main elements which include, communicator, message, media, audience and effect. This research is a qualitative type with the technique of determining the informants carried out by snowball sampling. Data collection techniques in this study were carried out through triangulation which included interviews, observations and documentation studies. The result of this study is that communicators in PKS communication in gaining votes among non-Muslims are carried out by three figures, namely PKS cadres as politicians, scholars as professionalism and the success team as activists. The political message that is built is a promise, the media used are digital media and direct field media. The mass audience is disorganized and the effect obtained is not optimal, because there is still a lack of voice and enthusiasm from non-Muslim groups towards political communication used by PKS.

Keywords: PKS, Non-Muslim, Political Communication, Karawang

(*) Corresponding Author: Muhidinagus97@gmail.com

How to Cite: Muhidin, A., Dewi, W., & Nurkinan, N. (2022). Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera Pada Masyarakat Non Muslim Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(13), 12-22. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6960999>.

PENDAHULUAN

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Karawang merupakan salah satu partai politik di Kabupaten Karawang yang memiliki basis massa cukup besar. Hal ini dibuktikan melalui berbagai macam survei dan hasil daripada pemilu maupun Pilkada yang telah berlangsung sebelumnya. Sebagai contoh di Pemilu serentak pada tahun 2019 PKS mampu menempati posisi ke lima dibawah Partai berbasis nasional Demokrat, Golongan karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Gerakan Indonesia Raya. Adapun untuk kelompok partai politik yang berazaskan Islam di Kabupaten Karawang, PKS masih dinilai dominan dengan unggul jauh dari pesaing-pesaingnya. Dilihat dari bagan dan tabel diatas, sejatinya PKS merupakan partai yang memiliki eksistensi tinggi di kalangan masyarakat Kabupaten Karawang, dimana terdapat lebih dari 134 ribu penduduk yang memberikan suaranya untuk PKS di Pemilu 2019. Meninjau kondisi tersebut, maka terdapat tugas besar bagi Partai Keadilan Sejahtera untuk mempertahankan atau bahkan melebihnya, mengingat adanya aturan baru dalam perpoltikan di Indonesia yakni Presidential dan Parleментарry Threshold atau

ambang batas masuknya kandidat dalam tataran parlemen kekuasaan negara atau lokal (Garwan & Hidayat, 2018) maka mau tidak mau PKS dituntut untuk mampu memenuhi pangsa konsumen Karawang yang notabene adalah daerah multikultural dalam menganut kepercayaan agama atau tidak sama 100% dengan azas yang diterapkan oleh PKS.

Meskipun Islam di merupakan agama mayoritas di Kabupaten Karawang, namun hal tersebut tidak menjamin Partai Keadilan Sejahtera mampu menarik hati masyarakat untuk memilih partainya. Hal ini dilandasi oleh beberapa hal diantaranya, Partai yang berazaskan atau bercorak Islam di Kabupaten Karawang tidak hany PKS semata, melainkan masih terdapat partai-partai lain semacam Partai Amanah Nasional (Muhammadiyah) dan Partai Keadilan Bangsa maupun Partai Persatuan Pembangunan (Nahdhatul Ulama). Sehingga merebut hati masyarakat Non-Muslim adalah kunci PKS untuk mampu mendongkrakya ke barisan tiga besar partai penguasa di Karawang.

Sejatinya prolehan suara Partai Keadilan Sejahtera pada pemilihan umum di Kabupaten Karawang cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 jumlah suara yang didapatkan pada ranah legislatif yakni sekitar 84 ribu namun terjadi lonjakan presentase sekitar 6,79 persen pada pemilu di tahun 2019 dengan prolehan suara sebanyak 134ribuan suara.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Karawang mendapati berbagai macam tantangan di akhir-akhir ini, penyebabnya adalah pemberitaan media yang cenderung memarjinalisasi kelompok politik Islam melalui stigma negatif berupa hembusan-hembusan isu radikalisme yang berkembang pesat di Indonesia, termasuk Kabupaten Karawang, yang tentu pemahaman tentang radikalisme dinilai dapat membahayakan ideologi bangsa, Pancasila dan keutuhan dari keberagaman budaya dan agama di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tersusun rapi dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika (Kemendagri RI, 2016).

Kondisi ini semakin diperburuk setelah fenomena aksi 212 di Jakarta tahun 2017 silam yang cenderung syarat muatan politik jual beli agama (Wulandari, 2019) dan kemenangan pasukan Thaliban di Afghanistan yang berdampak pada perubahan ideologi negara Afghanistan yang saat ini telah menerapkan regulasi Islam secara mutlak (Widasningrum, 2017). Meskipun PKS dalam (CNN Indonesia, 2021) menyatakan bahwa tidak akan berdampak pada perubahan kondisi geopolitik bangsa, namun Pengurus Besar Nahdhatul Ulama dalam (CNN Indonesia, 2021) menyatakan sebaliknya jika isu radikalisme dapat meningkat seiring dengan adanya sifat yang bertentangan dengan nasionalisme, salah satunya adalah sifat yang memainkan agama untuk sebuah kepentingan.

Atas adanya hembusan isu-isu tersebut membuat langkah PKS yang notabene adalah partai politik yang terbentuk atas haluan islam dan menjunjung tinggi semangat Ikhwanul Muslimin di Mesir semakin susah untuk meraup suara di kelompok non Muslim Karawang, terlebih Kabupaten Karawang secara tidak

langsung adalah kota industri yang memungkinkan segala bentuk informasi berjalan sangat masif sehingga menyebabkan masyarakat mudah tergiring oleh opini publik yang sedang berlangsung atau penganut komunikasi politik jarum hiprodemik (Sekamdo, 2001).

Selain daripada permasalahan dalam pemberitaan media yang tidak menguntungkan bagi PKS, terdapat problematika lain terhadap PKS untuk meraup suara non Muslim di Kabupaten Karawang, yakni semua kader Partai Keadilan Sejahtera merupakan penganut agama Islam sehingga dinilai tidak mampu untuk mempresentasikan kinerja karawang yang multikultural dan berpotensi pada penguatan ideologi islam di Kabupaten Karawang. Kerentanan ini semakin diperuncing melalui temuan peneliti yang melakukan pra penelitian terhadap tiga mahasiswa Non-Muslim Karawang, dimana ketiganya menyatakan belum berkenan apabila memberikan suaranya kepada PKS pada pemilu mendatang.

Melihat data tabel diatas maka Partai Keadilan Sejahtera dituntut untuk memperbaharui cara pendekatan yang baik untuk mendapatkan simpati masyarakat non muslim di Kabupaten Karawang, oleh karena itu komunikasi organisasi dinilai oleh sebagian besar pakar merupakan langkah yang tepat untuk digunakan partai politik berhaluan agamis seperti Partai Keadilan Sejahtera dalam meraup dukungan masyarakat di Pemilihan Umum Kabupaten Karawang (Purekolon, 2016, hal. 217).

Pada abad kesembilanbelas sampai sekarang komunikasi merupakan kunci dalam meyakinkan masyarakat, meskipun didalam komunikasi terkadang tidak ada jaminan operasionalisasi kinerja organisasi bisa tercapai dan berjalan selaras. Hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan organisasi perpolitikan itulah yang melahirkan gagasan baru dalam ranah ilmu komunikasi, yakni komunikasi politik (Russel, 2010).

Komunikasi Politik yang baik menurut Dan Nimmo (2018, hal. 73) dilakukan oleh suatu partai politik sangat berguna bagi kemenangan partai politik itu sendiri. Mengingat salah satu elemen dari komunikasi adalah menunjukkan identitas diri, maka komunikasi yang benar akan mengenalkan kepada orang lain identitas diri dalam hal ini adalah identitas partai politik kepada massa yang hadir. Dari identitas itu partai politik dapat membuat simpati dari rakyat yang berujung kemenangan.

Banyak teori yang berkembang dalam komunikasi politik, salah satunya adalah teori khalayak kepala batu yang merupakan bantahan dari teori jarum hiprodemik yang dikembangkan oleh Bauwer pada tahun 1964 dengan pernyataan bahwa masyarakat tidak pasif menerima informasi dan mampu melawan media. Masyarakat mempunyai keahlian dalam memilih dan menyerap atau menangkal semua informasi yang ditujukan kepada mereka. Komunikasi merupakan sebuah transaksi dimana Informasi yang diterima akan diseleksi oleh filter konseptual (Ardial, 2009, hal. 144)

Melalui kerangka tersebut, Partai Keadilan Sejahtera mencoba untuk masuk dan mengambil hati masyarakat non-muslim di Kabupaten Karawang melalui komunikasi politik dalam ruang lingkup kegiatan yang berbagai hal, diantaranya adalah menunjukkan sifat toleransi terhadap sesama manusia sehingga secara tidak langsung membantah bahwa partai Islam terlalu konservatis dan radikal sebagaimana yang sering terungkap di media.

Selain daripada penggunaan komunikasi politik khalayak batu, terdapat teori komunikasi politik lain yang dapat digunakan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam meraup suara di kalangan Non Muslim Kabupaten Karawang, yakni dengan merebut empati dengan tidak berpaku pada ideologi yang kaku, dimana PKS karawang dapat memberlakukan sistem ideologi terbuka bagi para kader yang notabene tidak Islam, sebagaimana yang dilakukan di beberapa daerah seperti Maluku Utara dan Bali.

Informasi yang baik sedang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dengan menjalin kerjasama dengan partai yang tidak hanya berazaskan Islam namun juga terhadap partai yang berideologi nasionalisme, seperti dalam Pilkada Kabupaten Karawang 2021, dimana PKS menyatakan dukungan terhadap pasangan Cellica-Aep sehingga koalisi ini melahirkan pembaharuan yang membeku di kalangan masyarakat Karawang yang masih beranggapan bahwa PKS adalah partai radikalisme yang kokoh dengan azas keislaman.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian historis akan komunikasi politik bermula pada tahun 1922 melalui penelitian yang dilakukan oleh Ferdinand Tonies dan Walter Lippman dengan tema yang merujuk pada penelitian tentang opini publik dan masyarakat. Sehingga apabila dirunut, kajian komunikasi politik merupakan cabang dari ilmu politik, meskipun pembicaraan tentang komunikasi politik tidak semudah mempelajari gerakan politik karena didalamnya terkandung proses komunikasi dan politik yang menaungi pertarungan antara persaingan teori, agenda dan konsep yang berkenaan dengan komunikasi dan politik (Canggara, 2009, hal. 16)

Secara etimologi komunikasi politik berasal dari dua suku kata, yakni komunikasi dan politik, dimana komunikasi sendiri menurut Riswandi (2009) berasal dari bahasa Inggris "*communication*", atau dalam bahasa latin "*communicatus*" yang berarti berbagi. Sementara politik sendiri menurut Hidajat Imam (2009, hal. 2) berasal dari bahasa Yunani, yakni "*Polis*" yang merujuk pada Kota yang telah berafiliasi dalam Civil State. Kemudian disempurnakan oleh Aristoteles dan Plato menjadi "*pollity*" yang bermakna pada strategi menggapai kesejahteraan (Seta, 2011, hal. 2)

Secara terminologi komunikasi politik memiliki banyak definisi oleh para ahli diantaranya adalah Nimmo (2018, hal. 9) yang mendefinisikan Komunikasi politik sebagai kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik

berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. Lalu Hafield Cangara (2009, hal. 32) yang menyebutkan jika komunikasi politik merupakan satu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik.

Menurut Dan Nimmo (2018) komunikasi politik dapat berjalan optimal apabila dilakukan melalui dukungan lima unsur utama yang meliputi, komunikator, pesan, media, khalayak dan efek. Adapun penjabaran dari kelima unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komunikator
2. Pesan
3. Media
4. Khalayak
5. Efek

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif karena Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok (Sugiyono, 2017) adapun yang ingin penulis teliti adalah persepsi masyarakat Non Muslim Karawang dan komunikasi politik dari PKS. Penelitian ini akan menggunakan jenis non probability sampling. Hal ini dikarenakan selain peneliti tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap unsur informan, melainkan juga peneliti dapat menggunakan instrument pendukung yang ada didalam non-probability sampling yakni purposive sampling dan snowball sampling (Sugiyono, 2017, hal. 219)

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, seperti sampel ditunjuk berdasarkan pengetahuan dia yang lebih tentang penelitian ini, seperti dalam penelitian ini adalah pengurus dan/atau ketua DPD PKS Karawang. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017, hal. 193) adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian, karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data. Pengumpulan data dapat dihasilkan dari observasi, wawancara, dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017, hal. 246) dimana Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun teknik ini terbagi dalam tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL & PEMBAHASAN

Analisis data merupakan sebuah bentuk pemaparan dari hasil penelitian yang didapatkan dengan melakukan wawancara dengan informan-informan penelitian yang dianggap dapat mewakili dan memberikan data terhadap judul Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera pada Masyarakat Non Muslim Di Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan teori Komunikasi Politik Dan Nimmo yang memiliki lima dimensi, yakni komunikator, pesan, media, khalayak dan efek. Maka peneliti ini telah melakukan penelitian ke lapangan dan hasil dari penelitian tersebut akan dideskripsikan melalui pembahasan yang lebih rinci seperti di bawah ini.

A. Komunikator

Peran komunikator pada komunikasi politik terletak dalam individu atau team yang bergerak untuk membentuk opini publik agar bersimpati pada kelompok tersebut. Dan Nimmo membagi komunikator kedalam tiga bagian yang meliputi, politikus, profesional dan aktivis. Politikus merupakan ujung tombak dari seorang komunikator dalam menjalankan komunikasi politik, sehingga dirinya dituntut untuk bisa menjadi tokoh yang penuh suri tauladan bagi khalayak yang disasar. Contoh komunikator politikus adalah wakil rakyat maupun tokoh-tokoh besar lain diluar kandidat, seperti pemilik partai politik. Komunikator profesional adalah sosok yang sering menghiasi pemikiran dari politikus dalam rangka mensukseskannya dalam komunikasi politik. Profesional tidak muncul di ruang publik seperti televisi melainkan dibelakang layar, karena tujuan dari profesional adalah sebagai makelar dan manipulator simbol. Aktivis sendiri adalah komunikator yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau khalayak yang dituju. Bisa menemani seorang politikus ketika berkampanye di masyarakat maupun mewakili politikus untuk tampil bertemu masyarakat maupun hadir di ruang publik.

Aktivitas komunikasi politik dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Karawang dalam meraup potensi suara dikalangan Non-Muslim yang berkenaan dengan dimensi komunikator adalah politikus sendiri ialah para kader Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Karawang baik yang sedang mencalonkan diri maupun tidak sama sekali mencalonkan diri diajang pemilihan umum baik sebagai legislatif daerah maupun nasional juga eksekutif ditingkatan Lokal hingga nasional. Adapun para kader politisi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Karawang sendiri diseleksi terlebih dahulu ketika mereka mendaftarkan diri sebagai kader partai melalui beberapa mekanisme yang berkaitan dengan ideologi mereka yakni Pancasila dan Islam

Selain kader, Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Karawang juga mempunyai komunikator lain seperti tokoh profesional yang dalam hal ini

merujuk pada para simpatisan namun ahli dibidangnya, seperti kaum akademis dari beberapa lembaga kemasyarakatan maupun kampus. Tokoh-tokoh ini dituntut untuk mampu memberikan bimbingan dan arahan kepada para aktivis maupun kader Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Karawang. Adapun aktivis dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Karawang adalah team pemenangan yang bertugas langsung untuk berhadapan dengan masyarakat yang dipilih dan digaji sesuai dengan banyak/tingginya potensi mereka dalam mendulang suara bagi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Karawang terutama dikalangan non-muslim Kabupaten Karawang.

B. Pesan

Pesan yang disampaikan komunikator adalah pernyataan sebagai panduan pemikiran dan perasaan, dapat berupa ide, informasi, keluhan, keyakinan, himbuan anjuran dan sebagainya. Sedangkan pesan dalam komunikasi politik dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain. Dan Nimmo mengindikasikan pesan kedalam tiga variabel yakni kekuasaan atau pembicaraan komunikator untuk mempengaruhi orang lain melalui ancaman atau janji, pengaruh atau pembicaraan komunikator untuk mempengaruhi khalayak lewat permintaan dan peringatan serta yang terakhir adalah autoritas atau pembicaraan yang bermuara pada kepatuhan khalayak kepada para pimpinannya.

Aktivitas komunikasi politik dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Karawang dalam meraup potensi suara dikalangan Non-Muslim yang berkenaan dengan dimensi Pesan politik adalah menggunakan konsep pembicaraan politik berdasarkan janji bukan ancaman, seperti tetap berlaku adil kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karawang baik yang bergama Islam maupun Kelompok Non-Muslim. Mereka juga memberikan kader sesuai dengan kebutuhan masyarakat namun tidak dilandasi oleh keyakinan beragama, hal ini ditujukan untuk mampu mempengaruhi kelompok Non-Muslim agar mau memberikan hak suaranya kepada Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Karawang.

C. Media

Komunikator mempunyai bentuk-bentuk simbolik dan kombinasinya dengan berbagai teknik dan media: secara lisan melalui perbincangan profesional, melalui catatan seperti buku dan majalah, dan teknik elektronik seperti radio atau televisi atau pada zaman ini lebih lekat dengan dunia media sosial. Dan Nimmo sendiri membagi media kedalam tiga unsur, yakni media massa, media komunikasi inter personal dan media komunikasi organisasi. Media komunikasi massa tidak hanya berkutat pada ruang digital elektronik maupun cetak melainkan juga di ranah lapangan nyata. Massa menghadirkan jenis komunikasi yang tidak terbatas

baik untuk kandidat maupun komunikator aktivis baik secara langsung maupun tidak langsung saat menghadapi khalayak. Berbeda dengan massa yang sifatnya tidak terbatas atau longgar, media komunikasi interpersonal cenderung menekankan pada hubungan timbal balik satu persatu, baik secara langsung maupun lewat perantara. Adapun yang terakhir adalah media komunikasi organisasi, dimana satu media dapat ditransformasikan untuk masuk kedalam hati maupun pikiran khalayak yang dituju secara luas, seperti yang sering kita jumpai yaitu pemasangan pamflet, spanduk, baliho maupun banner lainnya yang mengandung pesan komunikasi politik.

Aktivitas komunikasi politik dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Karawang dalam meraup potensi suara dikalangan Non-Muslim yang berkenaan dengan dimensi media, maka Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Karawang menggunakan dua konsep yakni konsep digital (Online) dan konsep lapangan langsung (Offline). Konsep digital mereka tempuh melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Namun kecenderungan yang dipakai adalah media Facebook karena tingginya masyarakat Karawang yang lebih antusias di media Facebook. Adapun secara lapangan langsung media yang digunakan oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Karawang adalah pamflet maupun banner yang dipasang di Jalan Raya maupun perdesaan yang ada di Kabupaten Karawang.

D. Khalayak

Nimmo memberikan pengertian khalayak dengan sejumlah orang yang bertindak atau cenderung bertindak yaitu, dalam berbagai tahap tindakan. Bila didefinisikan sebagai suatu kegiatan, suatu kelompok terdiri atas orang-orang yang melakukan kegiatan yang dipersatukan tanpa menghiraukan apakah yang mendasari kegiatan itu berupa organisasi formal atau tidak formal. Khalayak sendiri terbagi menjadi dua menurut Dan Nimmo, yaitu khalayak yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir. Maksud daripada khalayak yang terorganisir adalah khalayak yang masih perlu arahan dan bantuan dari pihak partai apabila melakukan pawai sementara yang tidak terorganisir adalah massa telah tertanam kuat ideologi partai sehingga mampu secara mandiri melakukan kampanye.

Aktivitas komunikasi politik dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Karawang dalam meraup potensi suara dikalangan Non-Muslim yang berkenaan dengan dimensi Khalayak, oleh karena tujuan dari penelitian ini mengetahui bagaimana cara komunikasi politik yang dibangun oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Karawang dalam meraup potensi suara dikalangan Non-Muslim maka Khalayak disini adalah massa organisasi yang tidak terorganisir, sehingga perlu ekstra

kerja bagi setiap komunikator untuk menselaraskan tujuan dengan ideologi yang mereka gunakan.

E. Efek

Efek adalah tahapan terakhir dari komunikasi politik, atau penilaian atas kinerja yang dihasilkan selama melakukan komunikasi politik. Efek sendiri akan menemui pada dua poin utama yakni keberhasilan atau kegagalan dari kuantitas khalayak yang memberikan dukungan suara di pemilihan raya.

Aktivitas komunikasi politik dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Karawang dalam meraup potensi suara dikalangan Non-Muslim yang berkenaan dengan dimensi efek dapat dikatakan belum optimal karena masih belum terpenuhinya suara yang maksimal dari kelompok Non-Muslim Kabupaten Karawang bagi Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Umum. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor mulai dari banyaknya saingan berat dari Partai Politik yang lebih mempunyai kesamaan pandangan seperti partai yang mempunyai massa basis dari agama selain Islam maupun kelompok partai politik berhaluan nasionalis. Selain itu, Partai Keadilan Sejahtera juga masih mempunyai stigma yang cukup bersebrangan dengan kelompok Non-Muslim seperti adanya tuduhan radikalisme tanpa adanya pluralisme dan konservatis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera Pada Masyarakat Non Muslim Di Kabupaten Karawang, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut

1. Komunikasi politik dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Karawang dalam meraup potensi suara dikalangan Non-Muslim yang berkenaan dengan dimensi komunikator, dilakukan oleh tiga indikator yakni kader Partai selaku pihak politikus, cendekiawan selaku pihak profesionalisme dan Team sukses selaku pihak aktivis
2. Komunikasi politik dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Karawang dalam meraup potensi suara dikalangan Non-Muslim yang berkenaan dengan dimensi Pesan dilakukan dengan cara memberikan pengaruh melalui janji-janji yang dapat mengakomodir kebutuhan dari kelompok Non-Muslim Karawang
3. Komunikasi politik dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Karawang dalam meraup potensi suara dikalangan Non-Muslim yang berkenaan dengan dimensi Media dilakukan dengan dua hal yakni melalui media digital seperti Facebook dan Instagram serta melalui media lapangan langsung seperti pemasangan baliho dan pamflet di Jalan hingga perdesaan.

4. Komunikasi politik dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Karawang dalam meraup potensi suara dikalangan Non-Muslim yang berkenaan dengan dimensi Khalayak adalah jenis organisasi massa tidak terorganisir karena bedanya pandangan ideologi Partai Keadilan Sejahtera dengan keyakinan yang dianut oleh kelompok Non-Muslim
5. Komunikasi politik dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Karawang dalam meraup potensi suara dikalangan Non-Muslim yang berkenaan dengan dimensi efek belum berjalan optimal karena minimnya suara yang diberikan oleh Kelompok Non-Muslim ketika pemilihan umum

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, F. (2013). Komunikasi Politik di Era Media Sosial . *Jurnal komunikasi, Volume 8, Nomor 1*, 91-102.
- Ardial. (2009). *Komunikasi politik*. Jakarta: Indeks.
- Arifin, A. (2011). *Komunikasi Politik Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, S. (2019). *PROSEDUR PENELITIAN : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Azra, A. (2011). *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Canggara, H. (2009). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Edward, D. (2006). *Efek Bola Salju Partai Keadilan Sejahtera*. Bandung: PT Syamil Cipta Media.
- Hasfi, N. (2019). Komunikasi Poitik di Era Digital. *Jurnal Politika, Universtitas Dipenogoro Vol. 10 No. 1*, 93-111.
- Imam, H. (2009). *Teori-Teori Politik*. Malang: Setara Press.
- Kadir, A. G. (2014). Dinamika Partai Politik di Indonesia. *Sosiohumaniora Vol. 16 No.2*, 132-136.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Marjan, K. (2010). *Sistem Politik Indonesin: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Preanada Media Group.
- Nimmo, D. (2018). *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Purekolon, T. T. (2016). *KOMUNIKASI POLITIK: Mempertahankan Integritas Akademis, Politikus dan Negarawan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahman, R. (2018). Interaksi Masyarakat Muslim dan Non Muslim di Kelurahan Balangnipa Kecamatan Dinjai Utara Kabupaten Sinjai. *Resoiratori UIN Alaudin Makasar*, 1-22.
- Riswandi. (2009). *Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Russel, N. (2010). *Communicating Science, Professional, Popular, Literary*. London: Cambridge University Press.

- Sekamdo, M. A. (2001, Maret 1). *Perpustakaan Universitas Gadjah Mada*. Retrieved Oktober 18, 2021, from Interansionalisasi Pergerakan dan Pemikiran Ikhwanul Muslimin: Analisis terhadap Konsep dan Kebijakan: <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/119724>
- Seta, B. (2011). *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Indie Book Corner.
- Setiawan, B., & Nainggolan, B. (2004). *Partai-Partai Politik Indonesia dalam Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Kompas.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana, C. (2021). Politik sebagai Dakwah: Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS). *Jurnal Communicatus, UIN Sunan Gunung Djati, Vol. 5 No. 1*, 41-58.